

ABSTRAK

PENGARUH IMPLEMENTASI PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2016 TERHADAP PEMBERIAN SUBSIDI LISTRIK

(Dian Ayu Mukti, Yunisca Nurmalisa, Berchah Pitoewas)

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh implementasi peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan Chi Kuadrat

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dengan kategori keeratan sedang antara implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016 dengan pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Namun pengaruh yang ada bersifat negatif karena empat dari lima indikator dalam penelitian ini berada dalam kategori kurang yakni tiga indikator dalam variabel X serta satu indikator dalam variabel Y.

Kata kunci : Masyarakat, Peraturan Menteri, Subsidi Listrik.

ABSTRACT

EFFECT OF IMPLEMENTATION OF THE ESDM REGULATION NUMBER 29 OF 2016 ON GIVING ELECTRIC SUBSIDIES

(Dian Ayu Mukti, Yunisca Nurmalisa, Berchah Pitoewas)

The purpose of this study was to describe the effect of implementing the Minister of Energy and Mineral Resources regulation number 29 of 2016 on the provision of electricity subsidies on target in the Kedaton area of Bandar Lampung City in 2018. The research method used in this research was descriptive method with a quantitative approach. The sample in this study amounted to 63 respondents. Data collection techniques using questionnaires and data analysis using Chi Square.

Based on the results of the research that has been done, it is known that there is a significant influence with the medium closeness category between the implementation of ESDM Ministerial Regulation number 29 of 2016 with the provision of electricity subsidies on target in the Kedaton Area, Bandar Lampung City in 2018. However, the influence is negative because four out of five the indicators in this study are in the less category namely three indicators in variable X and one indicator in variable Y.

Keywords : electricity subsidies, minister regulation, society.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara besar yang memiliki jumlah populasi terbesar ke empat di dunia, yang tersebar dari sabang sampai marauke. Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Pasal 4 “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Hasil penelitian Sari Novita dan Fardianah Mukhyar (dalam Jurnal Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat Trisna Subarna, 2012) menyatakan bahwa “Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai kesejahteraan ekonomi penduduk”. Jenis pengeluaran rumah tangga dapat dibagi atas pengeluaran pangan dan pengeluaran non-pangan. Salah satu pengeluaran non-pangan di Indonesia adalah pengeluaran listrik rumah tangga.

Untuk membantu masyarakat kurang mampu menghemat pengeluaran lis-

trik rumah tangganya pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan subsidi listrik untuk pengguna listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA namun pada awal tahun 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik untuk rumah tangga pengguna 900 VA dikarenakan masih banyak masyarakat pengguna listrik 900 VA yang masuk dalam kategori mampu juga mendapatkan subsidi listrik. Karena pencabutan subsidi listrik untuk pengguna 900 VA, banyak masyarakat kurang mampu pengguna listrik 900 VA merasa terbebani oleh pengeluaran listrik keluarganya dan sangat dibutuhkan kebijakan peng-ganti dari pemerintah untuk rumah tangga kurang mampu agar diring-ankan beban pengeluaran listriknya.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menangani masalah pengeluaran listrik rumah tangga adalah pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran. Mekanisme untuk mendapatkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 29 Tahun 2016 masyarakat dapat mengajukan subsidi listrik di kelurahannya masing-masing. Salah satu kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung adalah Kelurahan Kedaton. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung, didapatkan fakta bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum paham akan cara mendapatkan subsidi listrik tepat sasaran berdasarkan Permen ESDM no. 29 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, tentu saja cara mendapatkan subsidi listrik tepat sasaran sesuai dengan peraturan Menteri ESDM no. 29 Tahun 2016 merupakan hal yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar masyarakat kurang mampu dapat merasakan manfaat mendapatkan subsidi dan membantu masyarakat tersebut dalam mensejahterakan keluarganya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang pengaruh Implementasi Permen ESDM no. 29 tahun 2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

KEBIJAKAN PUBLIK

Pengertian Kebijakan Publik

James Anderson dalam Agustino (2012:7) menyatakan bahwa kebijakan Publik adalah “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.”

Model kebijakan publik George C. Edward III

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan Komunikasi suatu implementasi kebijakan publik mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group).

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape.

SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

Pengertian Subsidi

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, pasal 1 poin 16 menyatakan bahwa “Subsidi

adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat”

Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Subsidi listrik tepat sasaran merupakan pemberian subsidi berupa pemotongan pembayaran tarif listrik oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu setelah melalui mekanisme pengajuan. Pemotongan yang didapatkan oleh masyarakat kurang mampu adalah pemotongan pembayaran listrik per kWh. Pemberian subsidi listrik tepat sasaran diharapkan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan dalam keluarga.

KESEJAHTERAAN

Pengertian Kesejahteraan

Menurut Rambe (dalam Sunarti, 2006:2-13) “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan

ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat”.

Ruang Lingkup Kesejahteraan

1. Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Park (dalam Sunarti, 2006:2-14) “Kesejahteraan ekonomi sebagai dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan yang diperoleh oleh rumah tangga”.

2. Kesejahteraan Sosial

Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (self esteem) dan dukungan sosial.

3. Kesejahteraan Psikologi

Menurut Ryff (Ryff dan Keyes, 1995) “Kesejahteraan psikologis merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari serta mengarah pada ungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh

individu sebagai hasil dari pengalamannya.

Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sidiq Teja Purna, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yaitu dengan judul “Analisis Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 terhadap Pengelolaan Aset Tetap Daerah studi kasus pada dinas pekerjaan umum Kabupaten Mesuji”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam mengelola aset tetap daerah serta memberikan rekomendasi strategis dalam pengelolaan Aset Tetap Daerah berdasarkan kondisi yang ada di Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Dinas dinas pekerjaan umum Kabupaten Mesuji. Teknik Pengumpulan Data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Perbedaan yang jelas dengan penulis adalah terletak pada peraturan Menteri yang mengeluarkan serta metode hingga pendekatan. Persamaan yang terlihat dari penelitian ini adalah melihat pengaruh pada peraturan menteri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Ambar Putri, fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba) di PT ANTAM (Persero) TBK. Pongkor-Gold Mining Business Unit Bogor Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memberikan gambaran mengenai penerapan SMKP dalam Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2014. Perbedaan yang jelas dengan penulis adalah terletak pada metode dan pendekatan penelitian yang hanya saja yang sama yaitu Implementasi Peraturan Menteri ESDM.

Kerangka Pikir

Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 (X)

Indikator:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi

Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran (Y)

Indikator:

1. Kesejahteraan Psikologi
2. Kesejahteraan Ekonomi

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh Implementasi Permen ESDM no. 29 tahun 2016 terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh implementasi Permen ESDM No. 29 tahun 2016 terhadap pemberian

subsidi listrik tepat sasaran di kelurahan Kedaton kota Bandar Lampung.

Menurut Sugiyono (2008: 14) “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Populasi

Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat yang terdapat dalam data terpadu Kementerian Sosial berjumlah 627 Kepala Keluarga.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah masyarakat yang terdapat dalam data terpadu yakni sebesar 62,7 dibulatkan menjadi 63 kepala keluarga.

Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (X)

Variabel yang mempengaruhi atau disebut juga variabel bebas adalah

implementasi permen no. 29 tahun 2016.

b. Variabel Terikat (Y)

Variabel yang dipengaruhi atau disebut juga variabel terikat adalah pemberian subsidi listrik tepat sasaran.

Definisi Konseptual

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan berbentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pelaksana terkait untuk mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

Subsidi listrik tepat sasaran merupakan pemberian subsidi berupa potongan pembayaran tarif listrik oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu setelah melalui mekanisme pengajuan.

Definisi Operasional

a. Variabel X

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 adalah komunikasi antara implemenentor dengan target sasaran, sumber daya dan disposisi.

b. Variabel Y

Pemberian subsidi listrik tepat sasaran merupakan suatu kebijakan publik. Salah satu tujuan kebijakan publik adalah kesejahteraan masyarakat. Indikator dalam penelitian ini adalah kesejahteraan psikologi dan kesejahteraan ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pokok Angket

Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket tertutup yang berarti jawaban pada angket telah diberikan oleh peneliti. Dengan demikian responden hanya diminta untuk memilih salah satu dari jawaban yang telah tersedia dalam angket. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terdapat dalam data terpadu kementerian sosial di kelurahan Kedaton kota Bandar Lampung.

Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap objek penelitian dan kondisi tempat penelitian.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan profil kelurahan Kedaton Bandar Lampung.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

a. Uji Validitas

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan berupa validitas logis (*logical validity*), yaitu dengan cara mengkonsultasikan kepada dosen ahli terutama kepada dosen pembimbing.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

1. Melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden
2. Hasil uji coba dikelompokkan menjadi item ganjil dan item genap
3. Hasil item ganjil dan genap dikorelasikan dengan rumus product moment, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara gejala x dan y

x = variabel bebas

y = variabel terikat

N = jumlah sampel yang diteliti

4. Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus *Spearman Brown*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien reliabilitas seluruh item

r_{gg} = Koefisien korelasi item ganjil dan genap

5. Hasil analisis pengolahan data kemudian dikorelasikan dengan tingkat reliabilitas menurut Manasse Malo sebagai berikut:

0,90 - 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Persentase

Teknik analisis persentase ini digunakan untuk mengetahui data hasil angket tentang pengaruh implementasi Permen No. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di kelurahan Kedaton Bandar Lampung. namun sebelumnya untuk mengolah dan menganalisis data, menggunakan rumus interval terlebih dahulu:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan : I = Interval

NT = Nilai Tinggi

NR = Nilai Rendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut: $P = \frac{F}{N} \times 100\%$

Keterangan :

P : Besarnya Persentase

F : Jumlah Alternatif Seluruh Item

N : Jumlah Perkalian antar Item dan Responden

Pengujian Pengaruh

Pengujian suatu pengaruh menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan rumus sebagai berikut:

$$x^2 = \sum_{i=1}^B \sum_{j=1}^K \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan:

X^2 = Chi Kuadrat

$\sum_{i=1}^B$ = Jumlah Baris

$\sum_{j=1}^K$ = Jumlah Kolom

O_{ij} = Banyak Data yang Diharapkan

E_{ij} = Banyak Data hasil Pengamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Variabel X (Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016)

Indikator Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator komunikasi dalam Implementasi

Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 diperoleh data sebanyak 20 orang atau 31,74% responden menyatakan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan baik artinya sosialisasi dan informasi terkait cara mendapatkan subsidi berdasarkan Peraturan Menteri telah berjalan dan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

kemudian 32 orang atau 50,79% responden menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat masih kurang berjalan dengan baik artinya masih banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai cara mendapatkan subsidi berdasarkan Peraturan Menteri.

Serta 11 orang atau sebanyak 17,46% responden menyatakan bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya informasi yang responden dapatkan mengenai pengajuan subsidi listrik dan hal tersebut membuat masyarakat tidak mengetahui Permen ESDM No. 29 Tahun 2016.

Indikator Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator sumberdaya dalam implementasi permen ESDM no. 29 tahun 2016 diperoleh data sebanyak 15 orang atau 23,80% responden menyatakan bahwa sumberdaya dalam pelaksanaan Permen ESDM no. 29 tahun 2016 sudah terlaksana dengan baik artinya, sudah banyak masyarakat yang mengetahui bahwa kelurahan menyiapkan posko pengajuan dan sumberdaya manusia yang menjadi informan serta bertugas melayani masyarakat sesuai dengan Permen ESDM No. 29 Tahun 2016.

kemudian 31 orang atau 49,2% responden menyatakan bahwa sumberdaya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri masih kurang terlaksana dengan baik dikarenakan sedikitnya informasi yang responden dapatkan membuat responden mengetahui bahwa kelurahan menyiapkan posko pengajuan subsidi dan sumberdaya manusia yang bertugas melayani masyarakat namun mereka tidak

mengetahui jika hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016.

Serta 17 orang atau sebanyak 26,98% responden menyatakan bahwa tidak mengetahui sumberdaya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016.

Indikator Disposisi

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator disposisi dalam implementasi Permen ESDM no. 29 tahun 2016 diperoleh data sebanyak 9 orang atau 14,28% responden menyatakan bahwa disposisi sudah terlaksana dengan baik artinya masyarakat telah mengetahui tugas aparat yang bertugas dan tugas tersebut sudah terlaksana sesuai dengan Permen ESDM no. 29 tahun 2016.

kemudian 45 orang atau 71,42% responden menyatakan bahwa disposisi kurang terlaksana dengan baik dikarenakan sedikitnya informasi yang masyarakat dapatkan membuat masyarakat tahu apa saja yang harus dilakukan oleh petugas namun mereka tidak mengetahui apakah yang dilaksanakan petugas tersebut

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 29 tahun 2016 atau belum.

Serta 9 orang atau sebanyak 14,28% responden menyatakan bahwa disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri tidak terlaksana dengan baik artinya, masyarakat tidak mengetahui tugas dan wewenang para aparat berwenang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2016.

B. Variabel Y (Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran)

Indikator Kesejahteraan Psikologi

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator kesejahteraan psikologi dalam pemberian subsidi listrik tepat sasaran diperoleh data sebanyak 16 orang atau 25,39% responden menyatakan bahwa mereka setuju dan puas dengan pemberian subsidi listrik tepat sasaran.

kemudian 46 orang atau 73,01% responden menyatakan bahwa mereka masih belum puas dengan pemberian subsidi listrik tepat sasaran, serta 1 orang atau sebanyak 1,58% responden menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan pemberian subsidi

listrik tepat sasaran, hal ini terjadi karena masih ada masyarakat mampu yang mendapatkan subsidi listrik dilingkungan mereka dan sulitnya responden mendapatkan informasi mengenai subsidi listrik. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara mensosialisasikan subsidi listrik di kelurahan kedaton dan pemutakhiran data penerima subsidi listrik karena data terpadu yang digunakan saat ini masih data BPS tahun 2015.

Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data distribusi frekuensi indikator kesejahteraan ekonomi dalam pemberian subsidi listrik tepat sasaran diperoleh data sebanyak 37 orang atau 73,58% responden menyatakan bahwa subsidi dapat membantu mensejahterakan perekonomian keluarganya artinya dengan mendapatkan subsidi listrik maka biaya pengeluaran listrik rumah tangga berkurang dan hal tersebut membantu masyarakat menghemat pengeluaran rumah tangga serta masyarakat memiliki sisa uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Kemudian 22 orang atau 34,92% responden menyatakan bahwa subsidi kurang membantu mensejahterakan perekonomian keluarganya dikarenakan subsidi hanya membantu sedikit keluarganya dalam menghemat pengeluaran rumah tangga, serta 4 orang atau sebanyak 6,34% responden menyatakan bahwa subsidi tidak membantu mensejahterakan perekonomian keluarganya.

Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2016 Terhadap Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Tahun 2018

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 dengan Pemberian Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat, bahwa hasil χ^2 Hitung = 15,54. Kemudian dikonsultasikan dengan rumus Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh χ^2 Tabel = 9,49 dengan demikian χ^2 hitung lebih besar dari χ^2 Tabel (χ^2 hitung $\geq \chi^2$ Tabel), yaitu $15,54 \geq 9,49$,

serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antar variabel dalam kategori sedang yaitu dengan koefisien kontingensi $C = 0,44$ dan $C_{maks} = 0,81$ terletak pada keeratan pengaruh di atas 0,54 (kategori sedang), sehingga dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh antara implementasi peraturan menteri no. 29 tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung Tahun 2018.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan, serta pengujian pengaruh yang telah diuraikan tentang Pengaruh Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 terhadap pemberian subsidi listrik tepat sasaran, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Implementasi Permen ESDM No. 29 Tahun 2016 dengan pemberian subsidi listrik tepat di Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut beberapa saran dibawah ini:

1. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Lampung

Kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral hendaknya melakukan komunikasi kepada masyarakat secara langsung mengenai cara mendapatkan subsidi listrik sesuai dengan peraturan menteri nomor 29 tahun 2016 agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat dari mendapatkan subsidi listrik secara lebih optimal.

2. Kelurahan Kedaton

Kepada Kelurahan Kedaton baik petugas yang melayani pengajuan subsidi listrik maupun Lurah Kedaton diharapkan lebih mengoptimalkan tugas yang sudah diamatkan sehingga pemberian subsidi listrik dapat berjalan dengan baik.

3. Masyarakat

Kepada Masyarakat kurang mampu di Kelurahan Kedaton diharapkan dapat lebih berpartisipasi dalam proses pengajuan subsidi listrik dengan cara mencari informasi baik secara langsung maupun mencari informasi di media cetak atau media online. Mencari informasi secara

langsung dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara menanyakannya kepada petugas di kelurahan atau datang ke PT. PLN Persero.

Bogor. ISBN 978-602-8665-05-6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Online), diakses 05 Desember 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik Untuk Rumah Tangga, (Online) diakses 18 Oktober 2017.

Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. 1995. *The Structure Of Psychological Well-Being Revisited*. Journal Of Personality And Social Psychology, 69, 719-727.

Subarna, Trisna. 2012. *Analisis Kemiskinan dan Pengeluaran Non-Pangan Penduduk Jawa Barat*. Bandung: Peneliti Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarti, Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya*. Jurnal Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. (Online), diakses 25 Desember 2017.